

## **SKRIPSI**

### **URGENSI PRINSIP KERAHASIAAN DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**M. NAUFAL AL-HADI KASUMA**  
**2010112125**

**PROGRAM KEKUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)**



**Pembimbing:**

**Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**

**Almaududi, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

No. Alumni Universitas	M. Naufal Al-Hadi Kasuma	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir : Padang/18 Mei 2001 b. Nama Orangtua : Yulihendra & Yang Ariani c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Perdata e. No. BP : 2010112125	f. Tanggal Lulus : 28 Agustus 2024 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 0 Bulan i. IPK : 3,85 j. Alamat : Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.	

## URGENSI PRINSIP KERAHASIAAN DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

(M. Naufal Al-Hadi Kasuma, 2010112125, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 halaman + x, 2024)

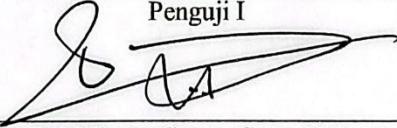
### ABSTRAK

Arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) telah banyak menjadi pilihan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara non-litigasi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan keunggulannya dibanding dengan berperkara secara litigasi. Putusan yang dihasilkan dari arbitrase bersifat *final and binding*, namun nyatanya masih dapat digugat kepada pengadilan, sebab dalam Pasal 17 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah membuka ruang bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan putusan kepada pengadilan. Penelitian ini mengusung dua permasalahan: *Pertama*, bagaimana pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan ditinjau berdasarkan prinsip kerahasiaan. *Kedua*, bagaimana urgensi prinsip kerahasiaan dalam pembatalan putusan arbitrase?. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menjadikan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai pendekatan paling utama dalam mengurai permasalahan. Pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa arbitrase mengandung prinsip kerahasiaan yakni *confidentiality* dan *privacy*. Namun, prinsip kerahasiaan ini hilang pada saat diajukannya pembatalan putusan arbitrase oleh salah satu pihak. Hal ini dibuktikan dalam analisis kasus Putusan PN Jaksel Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel. Hilangnya prinsip kerahasiaan ini tentu menimbulkan kerugian bagi para pihak. Sehingga menjadi suatu urgensi untuk melindungi prinsip kerahasiaan tersebut. Dalam rangka mengatasi masalah ini, diperlukan terobosan hukum melalui peran Mahkamah Agung untuk membentuk PERMA dalam rangka mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) agar terciptanya kepastian terhadap prinsip kerahasiaan dalam pembatalan putusan arbitrase. PERMA tersebut setidaknya berisi dua upaya dalam rangka melindungi prinsip kerahasiaan dalam pembatalan putusan arbitrase yakni: *Pertama*, membuat persidangan pembatalan putusan arbitrase bersifat tertutup. *Kedua*, Melakukan anonimisasi terhadap putusan pembatalan arbitrase. Dengan langkah tersebut, diharapkan kerahasiaan para pihak dapat terjamin, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini menjadi keniscayaan untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap mekanisme arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Arbitrase; Kerahasiaan; Pembatalan Putusan Arbitrase.

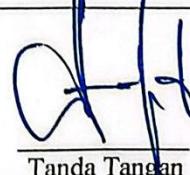
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Pengaji dan dinyatakan lulus pada 28 Agustus 2024.

Pengaji,

Tanda Tangan	Pengaji I 	Pengaji II 
Nama Terang	Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.	Ulfanova, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Perdata: Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

		Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

No. University Alumni	M. Naufal Al-Hadi Kasuma	No. Faculty Alumni
<p>a. Place/Date of Birth : Padang/18 May 2001            a. Parents Name : Yulihendra &amp; Yang Ariani            f. Faculty : Law            g. Concentratio : Civil Law            h. No. BP : 2010112125</p>	<p>e. Graduation Date : 28 August 2024            f. Predicate : With Honours            g. Length of Study : 4 Years 0 Months            h. GPA : 3,85            i. Address : Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.</p>	

## URGENCY OF CONFIDENTIALITY PRINCIPLE IN ANNULMENT OF ARBITRAL AWARDS

(M. Naufal Al-Hadi Kasuma, 2010112125, Faculty of Law Andalas University, 64 pages + x, 2024)

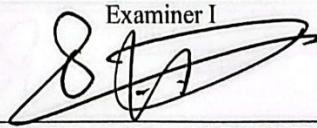
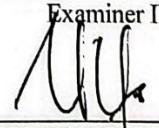
### ABSTRACT

Arbitration as one of the Alternative Dispute Resolution (ADR) has become an option for parties in resolving disputes in a non-litigation manner. This can be seen based on its advantages compared to litigation. The decision resulting from arbitration is final and binding, but in fact it can still be challenged to the court, because Article 17 of the Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law has opened space for the parties to submit an annulment of the decision to the court. This research carries two problems: First, how the annulment of arbitral awards by the court is reviewed based on the principle of confidentiality. Second, what is the urgency of the principle of confidentiality in the annulment of arbitral awards? In order to answer these problems, this paper uses normative juridical research by making a conceptual approach and case approach as the most important approach in parsing the problem. In this research, it can be said that arbitration contains the principle of confidentiality, namely confidentiality and privacy. However, this principle of confidentiality is lost when one of the parties files for annulment of the arbitration award. This is evidenced in the case analysis of the District Court Decision Number 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel. The loss of this principle of confidentiality certainly causes harm to the parties. So, that it becomes an urgency to protect the principle of confidentiality. In order to overcome this problem, a legal breakthrough is needed through the role of the Supreme Court to form a PERMA in order to fill the legal vacuum (rechtsvacuum) in order to create certainty over the principle of confidentiality in canceling arbitration awards. PERMA contains at least two efforts in order to protect the principle of confidentiality in the annulment of arbitration awards, namely: First, making the trial of annulment of arbitration award closed. Second, anonymizing the arbitration annulment decision. With these steps, it is hoped that the confidentiality of the parties can be guaranteed, so that no party is harmed. This is a necessity to maintain the integrity and trust in the arbitration mechanism as an effective and efficient alternative dispute resolution.

**Keywords:** Arbitration; Confidentiality; Annulment of Arbitral Award.

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by August, 28<sup>th</sup> 2024.

Examiner,

Signature	Examiner I 	Examiner II 
Name	Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.	Ulfandra, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Civil Law: Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.



Alumni has been registered in the Faculty/University Under the number:

		Faculty/University
No. Alumni Faculty:	Name:	Signature :
No. Alumni University:	Name:	Signature :